

# **PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP TRANSFER PEMERINTAH PUSAT DAN IMPLIKASINYA TERHADAP DISPARITAS PENDAPATAN (Studi Kasus Pada 33 Pemerintah Provinsi di Indonesia)**

Oleh  
**Lilis Rosita**  
Universitas Wanita Internasional  
[lilisrositai@iwu.ac.id](mailto:lilisrositai@iwu.ac.id)

## **ABSTRACT**

*Fiscal decentralization is when local government granted autonomy from central government to manage the budget that given. While the intergovernmental transfer is a transfer funds from the state budget allocated to the region in framework of decentralization. Income disparity is a reflection of the gap in development distribution results of a country among population. This study aims to provide empirical evidence about the effects of fiscal decentralization on intergovernmental transfers and the implications for income disparities.*

*The population are 33 provinces government in Indonesia. Sampling technic using saturated sample where all population being sampled. The analytical method used is descriptive analysis and verificative. This study were analyzed using path analysis equation to determine how much correlation and determination of variables to be concluded.*

*Hypothesis testing results show that (1)fiscal decentralization has strong influence on intergovernmental transfers and (2)intergovernmental transfers has strong influence on income disparity.*

**Keywords:** *Fiscal Decentralization, Intergovernmental Transfer, Income Disparity*

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Perubahan sistem tatanan pemerintahan di Indonesia melahirkan adanya kebijakan otonomi daerah yang mengatur hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Dengan adanya otonomi daerah pemerintah daerah dilimpahkan kewenangan dari pemerintah pusat untuk mengatur urusan pelayanan dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku seperti yang disebutkan oleh Saragih (2003:83). Kebijakan ini memberikan ruang bagi pemerintah daerah dalam membangun dan mengembangkan daerahnya secara mandiri.

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah merupakan kebijakan yang mengatur tentang otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan salah satu instrumen yang dinilai efektif dalam pelaksanaan pemerataan pembangunan di setiap daerah dengan harapan terjadinya efisiensi dalam pelaksanaan pemerintahan di daerah dan serta mampu menjadi solusi atas ketimpangan antar daerah yang dianggap sebagai dampak dari sistem sentralistik yang kurang adil. Kebijakan tersebut memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk menjalankan fungsi pelayanan dan pelaksanaan pembangunan dalam mengejar ketertinggalannya dari pemerintah daerah lain sesuai dengan kewenangan yang diaturnya. Implikasinya terhadap pemerintah daerah adalah menjadikan daerah untuk memiliki peran yang penting dalam mengatasi masalah pemerataan pembangunan dan pengelolaan pemerintahan secara mandiri.

Sebagai pelaksana utama pembangunan di daerahnya, pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk melaksanakan program-program pembangunan yang memiliki

dampak terhadap kesejahteraan masyarakatnya. Hal ini sesuai dengan amanat dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang mengamanatkan bahwa daerah memiliki kewenangan dalam mengelola daerahnya sendiri secara mandiri dan bertanggung jawab terhadap kepentingan masyarakatnya. Pada prinsipnya kebijakan otonomi daerah ini adalah untuk mendukung pembangunan nasional di negeri ini demi tercapainya pemerataan kapasitas daerah dari berbagai aspek. Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya dalam menjalankan otonomi seluas-luasnya berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Salah satu wujud pelaksanaan otonomi daerah ini adalah dengan adanya otonomi dalam aspek pengelolaan keuangan daerah yang disebut otonomi fiskal atau desentralisasi fiskal. Pemerintah daerah diberikan sumber-sumber keuangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Desentralisasi fiskal memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerahnya. Daerah diberikan kewenangan dalam menggali sumber-sumber penerimaan sesuai dengan potensi yang dimiliki. Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang kemudian diganti dengan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah mengatur hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Kebijakan tersebut mengatur kewenangan daerah dalam menggali pendapatan asli daerah dan dana transfer dari pemerintah pusat. Prinsip dari desentralisasi fiskal tersebut adalah money follow functions, dimana pemerintah daerah mendapat kewenangan dalam melaksanakan fungsi pelayanan dan pembangunan di daerahnya. Pemerintah pusat memberikan dukungan dengan menyerahkan sumber-sumber penerimaan kepada daerah untuk dikelola secara optimal agar mampu membiayai daerahnya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Disamping itu, pemerintah pusat juga memberikan dana transfer yang dapat dikelola daerah dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Tujuannya adalah untuk mengatasi ketimpangan fiskal dengan pemerintah pusat dan antar pemerintah daerah lainnya.

Namun kenyataannya pemerintah Indonesia belum mampu melaksanakan tujuannya tersebut. Berdasarkan fenomena yang terjadi sejak tahun 2001, dinyatakan bahwa jumlah dana transfer ke daerah yang digelontorkan pemerintah terus meningkat. Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2015, jumlah dana yang ditransfer pusat ke daerah pada 2001 sebesar Rp 81,1 triliun, pada 2010 sebesar Rp 344,7 triliun, dan pada 2015 mencapai Rp 664,6 triliun. Rata-rata transfer ke daerah mengambil porsi 30% dari total belanja APBN. Jumlah yang sangat besar tersebut ternyata belum memberi dampak pada kesejahteraan rakyat di daerah sesuai harapan desentralisasi fiskal. Sehingga pada Desember 2014, Menkeu Bambang Brodjonegoro menetapkan aturan tentang pengalokasian transfer ke daerah dan dana desa, yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 250/PMK.07/2014. Penetapan PMK itu bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengalokasian anggaran transfer ke daerah serta perubahan kebijakan penetapan alokasi transfer ke daerah dan dana desa yang telah diatur dalam peraturan presiden.

Dengan adanya dana transfer daerah dan dana desa yang digelontorkan pemerintah bertujuan untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah; mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara pusat dan daerah dan mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antardaerah; meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan publik di daerah; memprioritaskan penyediaan pelayanan dasar di daerah tertinggal, terluar, terpencil, terdepan, dan pascabencana; dan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan infrastruktur dasar.

Melihat tujuannya itu, keberadaan dana transfer daerah merupakan suatu kebijakan yang sangat baik dan patut didukung sepenuhnya. Namun, dana besar yang

dikeluarkan itu belum memberikan bukti nyata bagi kesejahteraan rakyat di daerah. Seperti yang disebutkan sebelumnya bahwa tujuan utama desentralisasi fiskal adalah mengatasi adanya ketimpangan antara pemerintah pusat dan daerah.

Hal ini ditunjukkan pada fakta di lapangan saat ini, dimana 10 tahun terakhir ini, tingkat disparitas pendapatan(ketimpangan) meningkat cukup tinggi yang tercermin dari angka terakhir Rasio Gini sebesar 0,41. Sejumlah analis mengatakan, angka disparitas dalam kenyataannya lebih tinggi lagi karena indikator pengeluaran bias dan tak sensitif terhadap pengeluaran nyata kelompok masyarakat menengah ke atas. Memburuknya disparitas sejalan dengan statistik yang menunjukkan kecenderungan peningkatan keparahan kemiskinan. Berbagai pihak mengaitkan disparitas dengan pola pembangunan yang tak berpihak ke kelompok miskin.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, jumlah penduduk miskin di Indonesia terbilang masih cukup tinggi. Pada 2010, jumlah penduduk miskin di Indonesia 31,02 juta orang atau 13,33% dari jumlah penduduk. Lalu, pada 2012, penduduk miskin 28,59 juta orang (11,66%) dan pada 2014 sebanyak 28,28 juta orang (11,25%). Meski angkanya semakin kecil, namun penurunan jumlah penduduk miskin itu belum signifikan.

Dari fenomena di atas sudah pernah diadakan penelitian sebelumnya. Tetapi fenomena ini masih belum teratasi sampai saat ini. Beberapa peneliti mengamati masalah desentralisasi fiskal terhadap disparitas pendapatan. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh sangat kuat terhadap disparitas pendapatan. Dalam aspek desentralisasi fiskal yang berperan penting dalam pembangunan ekonomi, jika diterapkan dengan baik maka tingkat disparitas pendapatan tidak akan terlalu tinggi. Penerapan desentralisasi fiskal dapat dikatakan baik apabila pemerintah daerah mampu mengelola dana transfer pemerintah pusat secara optimal.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Transfer Pemerintah Pusat Dan Implikasinya Terhadap Disparitas Pendapatan (Studi Kasus pada 33 Pemerintah Provinsi di Indonesia)”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Adapun uraian dari latar belakang penelitian dan identifikasi penelitian yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Seberapa besar pengaruh Desentralisasi Fiskal Pemerintah Daerah terhadap Transfer Pemerintah Pusat.
2. Seberapa besar pengaruh Transfer Pemerintah Pusat terhadap Disparitas Pendapatan.

## **II. KAJIAN PUSTAKA**

### **2.1 Desentralisasi Fiskal, Transfer Pemerintah Pusat dan Disparitas Pendapatan**

Pengertian desentralisasi fiskal berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004 “Desentralisasi fiskal adalah pelimpahan kekuasaan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengelola pendapatan dalam bidang fiskal”. Berbeda pendapat Saragih (2003) desentralisasi fiskal dapat diartikan sebagai berikut: “Desentralisasi fiskal adalah suatu proses distribusi anggaran dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah untuk mendukung fungsi atau tugas pemerintahan dan pelayanan publik sesuai dengan banyaknya kewenangan bidang pemerintahan yang dilimpahkan”.

Berdasarkan kedua pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa desentralisasi fiskal adalah kebijakan otonomi suatu pemerintah daerah yang menerima pelimpahan tanggung jawab dan wewenang dari pemerintah pusat untuk mengelola anggaran yang diberikan pemerintah pusat demi membangun pemerintahan daerah yang baik.

Selanjutnya konsep transfer pemerintah pusat menurut DKRI<sup>1</sup> adalah sebagai berikut: "Transfer ke Daerah adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang terdiri dari Dana Perimbangan dan Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian". Sedangkan menurut Dumairy (1999) dalam Imamul Arifin(2007) ketimpangan pendapatan atau distribusi pendapatan adalah: "Distribusi pendapatan nasional adalah mencerminkan merata atau timpangnya pembagian hasil pembangunan suatu negara di kalangan penduduknya".

Menurut Todaro(2011) Distribusi pendapatan dibedakan menjadi dua ukuran pokok yaitu;

"distribusi ukuran, adalah besar atau kecilnya bagian pendapatan yang diterima masing-masing orang dan distribusi fungsional atau distribusi kepemilikan faktor-faktor produksi".

Berdasarkan dua definisi diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa distribusi pendapatan mencerminkan ketimpangan atau meratanya hasil pembangunan suatu daerah atau negara baik yang diterima masing-masing orang ataupun dari kepemilikan faktor-faktor produksi dikalangan penduduknya.

## **2.2 Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Transfer Pemerintah Pusat**

Menurut Prud'-homme (2001), desentralisasi fiskal terhadap transfer pemerintah pusat merupakan: "salah satu instrumen untuk mencapai tujuan desentralisasi fiskal yang benar adalah transfer pusat"

## **2.3 Pengaruh Transfer Pemerintah Pusat Terhadap Disparitas Pendapatan**

Transfer pemerintah pusat terhadap disparitas pendapatan menurut Dumairy (1999) dalam Imamul Arifin(2007) merupakan ketimpangan pendapatan atau distribusi pendapatan adalah: "Distribusi pendapatan nasional adalah mencerminkan merata atau timpangnya transfer dana dan pembagian hasil pembangunan suatu negara di kalangan penduduknya".

Hasil pembangunan suatu negara merupakan tujuan dari distribusi transfer fiskal. Menurut Schroeder dan Smoke(2003) secara teori, justifikasi untuk transfer dari Pusat ke Daerah adalah untuk mencapai:

"transfer bertujuan untuk mencapai pemerataan fiskal vertikal, pemerataan fiskal horizontal"

## **2.4 Hipotesis**

Menurut Umi Narimawati(2010) hipotesis didefinisikan sebagai berikut:

"Hipotesis adalah suatu kesimpulan yang masih kurang atau kesimpulan yang masih belum sempurna sehingga harus dibuktikan kebenarannya".

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah diuraikan diatas penulis memberikan hipotesis bahwa:

H1 : Desentralisasi Fiskal berpengaruh terhadap Transfer Pemerintah Pusat

H2 : Transfer Pemerintah Pusat berpengaruh terhadap Disparitas Pendapatan.

# **III. METODE PENELITIAN**

## **3.1 Objek Penelitian**

Objek penelitian menurut Umi Narimawati (2010) adalah:"Objek penelitian menjelaskan tentang apa atau siapa yang akan dikaji dalam penelitian, termasuk kapan dan dimana penelitian dilakukan. Penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa objek penelitian digunakan untuk mendapatkan data yang sesuai dengan tujuan tertentu.

Adapun objek penelitian dalam penelitian ini adalah desentralisasi fiskal, transfer pemerintah pusat dan disparitas pendapatan.

### 3.2 Metode Penelitian

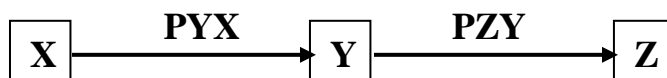
Metode dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dan verifikatif dengan pendekatan kuantitatif. Dalam penelitian ini, metode deskriptif dan verifikatif tersebut digunakan untuk menguji lebih dalam pengaruh variabel X (Desentralisasi Fiskal) terhadap Y (Transfer Pemerintah Pusat) dan dampaknya pada Z (Disparitas Pendapatan). Sehingga metode penelitian yang digunakan adalah metode verifikatif. Metode verifikatif berarti menguji teori dengan pengujian suatu hipotesis apakah diterima atau ditolak. Dengan menggunakan metode verifikatif akan diketahui hubungan yang signifikan antara variabel yang diteliti sehingga menghasilkan kesimpulan yang akan memperjelas gambaran mengenai objek yang diteliti. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.

Sumber sekunder merupakan sumber utama penelitian ini yaitu dokumentasi, namun juga menggunakan sumber primer melalui wawancara. Pengumpulan data sekunder dalam penelitian ini yaitu mengumpulkan informasi berupa Laporan Realisasi APBD Transfer Pusat, Rasio Desentralisasi Fiskal dan Gini Rasio tahun 2013, serta gambaran umum instansi, aktivitas dan dokumen-dokumen terkait dengan penelitian dari 33 Pemerintah Provinsi di Indonesia.

Dalam penelitian ini menggunakan *sampling* jenuh karena jumlah populasinya sedikit (terbatas) sehingga tidak memungkinkan untuk menggunakan sampel. Oleh karena itu peneliti mengambil jumlah sampel sama dengan jumlah populasi, yaitu sebanyak 33 sampel dari pemerintah provinsi di Indonesia.

### 3.3 Metode Pengujian Data

Dalam penelitian ini selain menggunakan metode deskriptif juga menggunakan metode verifikatif. Oleh karena itu, pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan alat uji statistik, yaitu Analisis Jalur (*Path Analysis*). Analisis jalur mengkaji hubungan sebab akibat yang bersifat struktural dari variabel independen terhadap variabel dependen dengan mempertimbangkan keterkaitan antar variabel independen. Model analisis jalur, adalah sebagai berikut:



Keterangan :

Z = Disparitas Pendapatan

Y = Transfer Pemerintah Pusat

X = Desentralisasi Fiskal

PYX = Koefisien jalur Desentralisasi Fiskal terhadap Transfer Pemerintah Pusat

PZY = Koefisien jalur Transfer Pemerintah Pusat terhadap Belanja Modal

Dalam penelitian ini yang akan diuji adalah Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Transfer Pemerintah Pusat, Pengaruh Transfer Pemerintah Pusat terhadap Disparitas Pendapatan, serta Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Transfer Pemerintah Pusat dan Implikasinya terhadap Disparitas Pendapatan. Dengan memperhatikan karakteristik variabel yang akan diuji, maka uji statistik yang akan digunakan adalah melalui perhitungan path analisis.

## IV. HASIL PENELITIAN

#### 4.1 Hasil Analisis Deskriptif

**Tabel 1**  
**Tabel Realisasi Data dari Anggaran Tahun 2013**

	Provinsi	Rasio Desentralisasi Fiskal (%)	Tranfer Pusat (000 rupiah)	Gini Rasio (%)
1	Aceh	98,84	9.330.839,00	34,10
2	Sumatera Utara	98,52	3.251.772,00	35,40
3	Sumatera Barat	71,64	1.240.880,00	36,30
4	Riau	80,53	3.610.182,00	37,40
5	Jambi	99,91	1.814.055,00	34,80
6	Sumatera Selatan	71,72	2.644.843,00	38,30
7	Bengkulu	99,60	1.169.073,00	38,60
8	Lampung	98,75	2.108.223,00	35,60
9	Kepulauan Bangka Belitung	100,00	1.033.324,00	31,30
10	Kepulauan Riau	79,49	1.477.316,00	36,20
11	DKI Jakarta	95,90	11.517.024,0	43,30
12	Jawa Barat	99,84	0	41,10
13	Jawa Tengah	99,69	6.857.409,00	38,70
14	DI Yogyakarta	99,16	5.104.916,00	43,90
15	Jawa Timur	96,68	1.356.662,00	36,40
16	Banten	80,69	5.434.710,00	39,90
17	Bali	99,01	1.126.004,00	40,30
18	Nusa Tenggara Barat	65,78	1.553.987,00	36,40
19	Nusa Tenggara Timur	98,97	1.075.005,00	35,20
20	Kalimantan Barat	71,66	1.858.795,00	39,60
21	Kalimantan Tengah	97,82	1.382.042,00	35,00
22	Kalimantan Selatan	98,57	1.690.869,00	35,90
23	Kalimantan Timur	99,73	1.812.350,00	37,10
24	Sulawesi Utara	99,93	5.730.390,00	42,20
25	Sulawesi Tengah	99,32	1.271.907,00	40,70
26	Sulawesi Selatan	99,61	1.466.151,00	42,90
27	Sulawesi Tenggara	98,89	2.297.581,00	42,60
28	Gorontalo	99,82	1.451.899,00	43,70
29	Sulawesi Barat	51,08	844.914,00	34,90
30	Maluku	99,86	772.106,00	37,00
31	Maluku Utara	73,12	1.240.685,00	31,80
32	Papua Barat	100,00	1.089.022,00	43,10
33	Papua	66,10	5.401.414,00	44,20
			7.438.399,00	
	<b>Rata-Rata</b>	<b>90,61</b>	<b>2.953.174,18</b>	<b>38,30</b>
	<b>Terbesar</b>	<b>100</b>	<b>11.517.024,00</b>	<b>44,20</b>
	<b>Terkecil</b>	<b>51,08</b>	<b>772.106,00</b>	<b>31,30</b>

Tabel di atas mendeskripsikan data realisasi rasio desentralisasi fiskal, transfer pusat, dan rasio disparitas pendapatan (gini rasio) pada 33 pemerintah provinsi Indonesia. Rata-rata rasio desentralisasi fiskal sebesar 90,61%, transfer pemerintah sebesar Rp2.953.174,18(perseribu), dan rasio gini sebesar 38,30%.

Rasio desentralisasi fiskal tertinggi sebesar 100% pada provinsi Papua Barat, dan Kepulauan Bangka Belitung yang menandakan bahwa provinsi tersebut sudah mampu menerapkan desentralisasi fiskalnya dengan baik. Rasio desentralisasi fiskal terendah sebesar 51,08% pada provinsi Sulawesi Barat. Hal ini menunjukkan bahwa

provinsi Sulawesi Barat belum mampu menjalankan desentralisasi fiskal dan masih bergantung dengan pemerintah pusat.

Tetapi hal yang paling mengkhawatirkan adalah daerah provinsi DI Yogyakarta. Meskipun daerahnya mampu mengelola kebijakan desentralisasi fiskal sebesar 99,16% di atas rata-rata, tetapi juga memiliki tingkat ketimpangan terbesar di provinsi Indonesia sebesar 43,90% melebihi rata-rata ketimpangan Indonesia yang sebesar 41%.

#### 4.2 Hasil Analisis Verifikatif

Pada bagian ini akan uraikan hasil analisis verifikatif mengenai desentralisasi fiskal terhadap transfer pemerintah pusat dan implikasinya terhadap disparitas pendapatan.

Untuk menjawab permasalahan tersebut akan dilakukan pengolahan data dengan menggunakan pertama penulis menguji distribusi data dengan uji normalitas.

**Tabel 2**  
**Uji Normalitas Variabel**  
**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Transfer	Disparitas	Desentralisasi _Fiskal
N		33	33	33
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	2953174,181	38,3000	90,6130
	Std. Deviation	2679437,366	3,59931	13,86619
Most Extreme Differences	Absolute	,265	,125	,345
	Positive	,265	,125	,249
	Negative	-,208	-,103	-,345
Kolmogorov-Smirnov Z		1,520	,721	1,985
Asymp. Sig. (2-tailed)		,020	,677	,001

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa variabel terdistribusi normal.

Sebelum melakukan uji analisis jalur, penulis melakukan uji korelasi antara ketiga variabel. Hasil dibawah ini menunjukkan bahwa korelasinya diantara ketiga variabel adalah signifikan.

**Tabel 3**  
**Uji Korelasi Pearson**  
**Correlations**

		Transfer	Disparitas	Desentralisasi _Fiskal
Transfer	Pearson Correlation	1	,227	,155
	Sig. (2-tailed)		,203	,389
	N	33	33	33
Disparitas	Pearson Correlation	,227	1	,158
	Sig. (2-tailed)	,203		,381
	N	33	33	33
Desentralisasi_Fiskal	Pearson Correlation	,155	,158	1
	Sig. (2-tailed)	,389	,381	
	N	33	33	33

Selanjutnya analisis jalur (*path analysis*) yang akan disajikan dalam dua sub struktur. Untuk sub struktur pertama akan dilakukan untuk mengetahui pengaruh desentralisasi fiskal terhadap transfer pemerintah pusat, sedangkan sub struktur kedua dilakukan untuk mengetahui pengaruh transfer pemerintah pusat terhadap disparitas pendapatan.

#### **Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Transfer Pemerintah Pusat**

Dengan menggunakan SPSS, diperoleh koefisien jalur sub pertama sebagai berikut:

**Tabel 4**  
**Analisis Jalur Sub Pertama**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	241239,810	3141951,225		,077	,939
Desentralisasi_Fiskal	29928,746	34287,283	,155	,873	,389

a. Dependent Variable: Transfer

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa Desentralisasi Fiskal bernilai 0,873 yang berarti sebesar 87,3% desentralisasi fiskal mempengaruhi Transfer Pemerintah Pusat.

**Tabel 5**  
**Koefisien Determinasi Sub Pertama**  
**Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,155 <sup>a</sup>	,0624	-,007	2689460,72494

a. Predictors: (Constant), Desentralisasi\_Fiskal

Dari hasil R Square menunjukkan bahwa Transfer Daerah mempengaruhi Desentralisasi Fiskal dengan sangat kuat.

#### **Pengaruh Transfer Pemerintah Pusat Terhadap Disparitas Pendapatan**

**Tabel 6**  
**Koefisien Determinasi Sub Kedua**  
**Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,259 <sup>a</sup>	,067	,005	3,59055

a. Predictors: (Constant), Transfer, Desentralisasi\_Fiskal

Dari hasil Determinasi R Square menunjukkan bahwa sebanyak Transfer Daerah berpengaruh kuat terhadap Disparitas Pendapatan.



**Tabel 7**  
**Analisis Jalur Sub Kedua**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	34,524	4,195		8,230	,000
Desentralisasi_Fiskal	,033	,046	,125	,703	,488
Transfer	2,793E-7	,000	,208	1,165	,253

a. Dependent Variable: Disparitas

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa Tranfer Pemerintah Pusat bernilai 0,253 yang berarti sekitar 25,3% mempengaruhi Disparitas Pendapatan.

## **V. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **5.1 Kesimpulan**

Dari hipotesis yang diuji menunjukkan hasil bahwa variabel desentralisasi fiskal terhadap transfer pemerintah pusat memiliki pengaruh yang sangat erat. Selain itu, uji hipotesis terhadap pengaruh desentralisasi fiskal terhadap transfer pemerintah pusat dan implikasinya terhadap disparitas pendapatan menunjukkan hasil dimana desentralisasi fiskal berpengaruh terhadap disparitas pendapatan yangmana transfer pemerintah pusat menjadi penghubung diantara kedua variabel tersebut. Jika desentralisasi fiskalnya tinggi, tetapi transfer pemerintah pusatnya rendah, maka disparitas pendapatannya juga akan rendah.

### **5.2 Saran**

Pemerintah provinsi Indonesia harus mampu untuk tidak terlalu bergantung pada transfer dari pemerintah pusat dalam membangun perekonomian provinsinya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Andry Muhammad. 2013. *Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Disparitas Pendapatan Regional di Indonesia Tahun 2001-2008*. Jurnal Organisasi dan Manajemen. Vol. 9, No. 1, p. 1-20.
- Aulia Nely. 2014. *Hubungan Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Kemiskinan, dan Kesenjangan Pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012*. Jurnal Ekonomi Pembangunan. ISSN: 2252-6765, Vol. 3, p. 327-336. Universitas Negeri Semarang.
- Delis, Rosmeli, dan Novita. 2009. *Analisis Ketimpangan Antar Wilayah di Indonesia Periode 1990-2008*. Universitas Jambi.
- Gilarso T. 2003. *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro*. Yogyakarta: Kanisius, Edisi Revisi.
- Halim Abdul. 2007. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Salemba Empat, Edisi Ketiga.
- Harun, Lukman dan Maski, Ghozali. 2012. *Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Ketimpangan Pembangunan Wilayah (Studi pada Kabupaten dan Kota di Jawa Timur)*. Universitas Brawijaya.
- Hessel Nogi. 2005. *Manajemen Publik*. Jakarta: Grasindo.
- Imamul Arifin. 2007. *Membuka Cakrawala Ekonomi*. Bandung: Setia Purna Inves.

- Luiz R. 2000. *Fiscal Decentralization and Intergovernmental Fiscal Relations: A Cross-Country Analysis*. World Development. ISSN: 0305-750X, Vol. 28, No. 2, p. 365-380. University of Kent, United Kingdom.
- Mardiana dan Syafril Basri. 2012. *Desentralisasi Fiskal dan Disparitas Regional di Provinsi Riau*. Jurnal Ekonomi. Vol. 20, No. 4. Universitas Riau.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Narimawati Umi. 2007. *Riset Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Agung Media.
- Narimawati Umi. 2010. *Penulisan Karya Ilmiah: Panduan Awal Menyusun Skripsi dan Tugas Akhir Aplikasi Pada Fakultas Ekonomi UNIKOM*. Jakarta: Genesis.
- Oktavilia Shanty. 2011. *Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal Daerah Tertinggal sebagai Upaya Mengatasi Disparitas Pendapatan Antar Daerah di Provinsi Jawa Tengah*. Jurnal Ekonomi Pembangunan. ISSN: 2089-3590, Vol. 2, No. 1, p. 219-228. Universitas Islam Bandung.
- Prud'homme Remy. *Policy Research Working Paper 1252: On the Dangers of Decentralization*. Policy Research Dissemination Centre. Washington DC.
- Sjafrizal. 2008. *Ekonomi Regional: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Niaga Swadaya.
- Suara Pembaruan. Jumat, 5 Juni 2015. *Efektivitas Dana Transfer Daerah*. sp.beritasatu.com:2015.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Bisnis Cetakan Ke-12*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D Cetakan Ke-14*. Bandung: Alfabeta.
- Todaro, M.P. dan Stephen C.S. 2011. *Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga, Edisi Kesembilan.
- Umiyati Etik. 2012. *Analisis Tipologi Pertumbuhan Ekonomi dan Disparitas Pendapatan dalam Implementasi Otonomi Daerah di Provinsi Jambi*. Jurnal Paradigma Ekonomika. Vol. 1, No. 5, p. 15-21. Universitas Jambi.
- Waluyo Joko. 2007. *Dampak Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan Antardaerah di Indonesia*. Universitas Indonesia.
- Wardhana Adhitya, dkk. 2013. *Dampak Transfer Pemerintah Pusat terhadap Penurunan Ketimpangan Pendapatan di Indonesia*. Sosiohumaniora. Vol. 15, No. 2, p. 111-118. Universitas Padjajaran.